

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Program Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan merupakan Program wajib yang harus dilaksanakan. Karena merupakan Misi Nasional yang dilimpahkan ke daerah untuk dimaksimalkan perannya sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sejalan dengan 9 (Sembilan) Agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA), untuk Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui agenda Nawacita :

1. ke 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Ke-5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
3. Ke- 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.

dengan mensinergikan program-program untuk mewujudkan terlaksananya agenda prioritas Nawacita Tersebut.

Dalam melaksanakan Visi Bupati Biak Numfor yaitu *RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA* Dan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui Renstra DP3AKB Tahun 2014 – 2019 yaitu “ Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Menuju Keluarga Mandiri Dan Sejahtera.”, dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Kualitas hidup Perempuan dan Anak.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana secara mandiri, Kesehatan Reproduksi dalam membangun Keluarga Sejahtera.

4. Meningkatkan Kualitas Hidup dan kesejahteraan Keluarga.

. Dengan prioritas program-program yaitu :

1. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Program Penguatan Kelembagaan Perempuan
3. Program Pengaruhutamakan Gender (PUG)
4. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5. Program Kesehatan Reproduksi
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pengelolaan Data dan Informasi

Untuk tahun 2019 program-program tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AKB tahun Anggaran 2019, dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dokumen tersebut.

## **2. Gambaran Umum**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan program-program pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Biak Numfor. Program-program tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPKB Kabupaten Biak Numfor sebanyak 15 Program sebagai acuan dalam menyusun Rencana kerja (Renja).

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DP3AKB ditunjang dengan tenaga yang profesional dan handal, yaitu sebanyak 48 Orang yang terdiri dari 28 Tenaga Struktural, 13 Pegawai Fungsional dengan status pegawai Vertikal dan 5 Tenaga Kontrak (Honorar).

dari Jumlah tenaga tersebut telah ditempatkan di Kantor sebanyak 32 Pegawai dan 14 Pegawai di Kecamatan

**BAB II**  
**PROGRAM / KEGIATAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN REALISASI**  
**DP3AKB TAHUN ANGGARAN 2019**

**1. Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DP3AKB tahun anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	5	
1	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>15.000.000,00</b>
	a. Penyusunan Renstra SKPD	Biak Numfor	DAU	15.000.000,00
2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>383.500.000,00</b>
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Biak Numfor	DAU	46.800.000,00
	b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Biak Numfor	DAU	70.000.000,00
	c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biak Numfor	DAU	96.000.000,00
	d. Penyediaan alat tulis kantor	Biak Numfor	DAU	60.400.000,00
	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Biak Numfor	DAU	18.300.000,00
	f. Penyediaan Makanan dan Minuman	Biak Numfor	DAU	32.000.000,00
	g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biak Numfor	DAU	60.000.000,00
3	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>69.000.000,00</b>
	a. Pengadaan mebeleur	Biak Numfor	DAU	39.000.000,00
	b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Biak Numfor	DAU	30.000.000,00
4	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>37.500.000,00</b>
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Biak Numfor	DAU	37.500.000,00
5	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>10.000.000,00</b>
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Biak Numfor	DAU	10.000.000,00
6	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>			<b>300.000.000,00</b>
	a. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender (Otsus)	Biak Numfor	OTSUS	300.000.000,00
7	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>			<b>250.000.000,00</b>
	a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan OAP di Distrik dan Kampung-Kampung (Otsus)	Biak Numfor	OTSUS	250.000.000,00
8	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>			<b>250.000.000,00</b>

	a. bimbingan manajemen usaha bagi perempuan OAP dalam mengelola usaha (Otsus)	Biak Numfor	OTSUS	250.000.000,00
<b>9</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>			<b>8.519.713.000,00</b>
	a. Pengadaan Alkon (Dak Fisik)	Biak Numfor	DAK	1.330.000.000,00
	b. Operasional Distribusi Alkon (DAK Non Fisik)	Biak Numfor	DAK NON FISIK	267.080.000,00
	c. Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (DAK Non Fisik)	Biak Numfor	DAK NON FISIK	554.400.000,00
	d. Operasional Integrasi Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Biak Numfor	DAK NON FISIK	2.979.900.000,00
	e. Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	Biak Numfor	DAK NON FISIK	2.644.050.000,00
	f. Dukungan Media KIE dan Management BOKB (DAK Non Fisik)	Biak Numfor	DAK NON FISIK	474.283.000,00
	g. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Otsus)	Biak Numfor	OTSUS	200.000.000,00
	h. Pengadaan Alkon/Non Alkon (DAK Fisik)	Biak Numfor	DAK	70.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>9.834.713.000,00</b>

## 2. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator kunci dari aspek tingkat capaian kinerja tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kerja Utama (IKK) pada Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

**DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA  
LAMP. II (PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2019**

NO. IKK	INDIKATOR KERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
47	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{1.517 \text{ Perempuan}}{17.735 \text{ Perempuan}} \times 100\% = 8,55 \%$	DP3AKB
50	Prevalensi Peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{13.822 \text{ Akseptor}}{25.846 \text{ PUS}} \times 100\% = 53 \%$	DP3AKB
51	Rasio Petugas Lapangan KB/PKB (PLKB/PKB)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah PLKB/PKB}} \times 100\%$	$\frac{265 \text{ Desa/Kelurahan}}{13 \text{ PKB/PLKB}} \times 100\% = 4.90 \%$	DP3AKB

**TAMBAHAN PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA  
LAMP. II (PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2019**

NO. IKK	INDIKATOR KERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
75	Persentase Angg. Pada Belanja Langsung APBD	Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah $\frac{\text{Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$	1.517 Perempuan $\frac{1.517}{17.735} \times 100\% = 8,55\%$ 17.735 Perempuan	DP3AKB
76	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani Instansi Terkait	Jumlah Anak (Penduduk Usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani Instansi tk. Kabupaten yg didampingi $\frac{\text{Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani Instansi tk. Kabupaten yg didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk Usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	11 Anak $\frac{11}{55,079} \times 100\% = 5,07\%$ 55,079 Anak	DP3AKB
77	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk ZTPPO(per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan $\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100\%$	0 $\frac{0}{69.903} \times 100\% = 0\%$ 69.903 Perempuan	DP3AKB
78	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani $\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani}}{\text{Jumlah korban Kekerasan terhadap Perempuan}} \times 100\%$	11 Korban $\frac{11}{29} \times 100\% = 37,93\%$ 29 Korban	DP3AKB
79	Persentase Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$	1517 $\frac{1517}{17.735} \times 100\% = 8,55\%$ 17.735	DP3AKB

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan persentase Jumlah Akseptor KB atau Peserta KB Aktif tahun 2019 yaitu 13.822 Akseptor dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 25.846 PUS atau 53, %, dan rasio penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sebanyak 13 PKB di bandingkan jumlah Desa/Kelurahan 265 Desa/Kel, atau 4,90 %, untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , dari jumlah seluruh perempuan baru 8,55% yang bekerja di lembaga pemerintahan. Pada anak korban kekerasan yang ditangani dari jumlah anak adalah sebesar 5,07%, dan 37,93% persen korban perempuan yang terlayani dari seluruh korban perempuan.

Untuk indikator keberhasilan Kegiatan /Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2019 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AKB tahun 2019 yang bersumber dari Dana DAU, Otsus dan DAK fisik/ Non Fisik berupa Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

### **3. Realisasi Anggaran/Keuangan**

Pelaksanaan program/kegiatan operasional DP3AKB Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, yang dibiayai Dana APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/Non Fisik dan Dana Otsus sebesar Rp. 12.322.791.902,-, Realisasi sebesar Rp. 10.627.753.433 atau 86,24 %

Perincian adalah sebagai berikut

1. Belanja Tidak langsung : DPA. Rp. 2.488.078.902,- Realisasi Rp. 1.957.304.937,- atau Persentase sebesar Rp. 76,67 %
2. Belanja Langsung : DPA Rp. 9.834.713.000,- Ralisasi Rp. 8.670.448.496,- atau Persentase sebesar 87,56 %.

Secara Rinci Capaian Program/kegiatan DP3AKB tahun 2019 adalah sebagai Berikut :

## REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DP3AKB TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Uraian	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	DAU	<b>2.488.078.902</b>	<b>1.957.304.937,00</b>	<b>78,67%</b>
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	DAU, DAK, OTSUS	<b>9.834.713.000</b>	<b>8.670.448.496,00</b>	<b>88,16%</b>
1	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	a. Penyusunan Renstra SKPD	DAU	15.000.000,00	0,00	0%
2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>383.500.000,00</b>	<b>359.514.996,00</b>	<b>93,75%</b>
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	46.800.000,00	26.815.496,00	57,30%
	b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DAU	70.000.000,00	70.000.000,00	100%
	c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DAU	96.000.000,00	96.000.000,00	100%
	d. Penyediaan alat tulis kantor	DAU	60.400.000,00	60.399.500,00	100%
	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	18.300.000,00	14.300.000,00	78,14%
	f. Penyediaan Makanan dan Minuman	DAU	32.000.000,00	32.000.000,00	100%
	g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DAU	60.000.000,00	60.000.000,00	100%
3	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>69.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>100%</b>
	a. Pengadaan mebeleur	DAU	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
	b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DAU	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
4	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>100%</b>
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DAU	37.500.000,00	37.500.000,00	100%
5	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100%</b>
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
6	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender (Otsus)	OTSUS	300.000.000,00	0	0%
7	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan OAP di Distrik dan Kampung-Kampung (Otsus)	OTSUS	250.000.000,00	0	0%



<b>8</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a. bimbingan manajemen usaha bagi perempuan OAP dalam mengelola usaha (Otsus)	OTSUS	250.000.000,00	0	0%
<b>9</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>		<b>8.519.713.000,00</b>	<b>8.194.433.500,00</b>	<b>96,18%</b>
	a. Pengadaan Alkon (Dak Fisik)	DAK	1.330.000.000,00	1.327.850.000,00	<b>99,84%</b>
	b. Operasional Distribusi Alkon (DAK Non Fisik)	DAK NON FISIK	267.080.000,00	267.080.000,00	<b>100%</b>
	c. Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (DAK Non Fisik)	DAK NON FISIK	554.400.000,00	546.900.000,00	<b>98,65%</b>
	d. Operasional Integrasi Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)	DAK NON FISIK	2.979.900.000,00	2.925.165.200,00	<b>98,16%</b>
	e. Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	DAK NON FISIK	2.644.050.000,00	2.583.155.300,00	<b>97,70%</b>
	f. Dukungan Media KIE dan Management BOKB (DAK Non Fisik)	DAK NON FISIK	474.283.000,00	474.283.000,00	<b>100%</b>
	g. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Otsus)	OTSUS	200.000.000,00	0	<b>0%</b>
	h. Pengadaan Alkon/Non Alkon (DAK Fisik)	DAK	70.000.000,00	70.000.000,00	<b>100%</b>
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG</b>			<b>12.322.791.902,00</b>	<b>10.627.753.433,00</b>	<b>86,24%</b>

## **BAB. III**

### **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **1. Permasalahan**

Secara umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tetapi dalam pelaksanaan Program / Kegiatan ada beberapa masalah yang dihadapi seperti :

- a. Sebagai Akibat dari kebijakan Pemerintah Propinsi Papua tentang Pengurangan penyaluran anggaran Otonomi Khusus (Otsus) tahun Anggaran 2019, berdampak pada beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana khususnya program-program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang-bidang dan Sub Bidang masih lemah, akibat dari belum dilantikannya Pejabat Definitif untuk menduduki jabatan tersebut

#### **2. Solusi**

- a. Solusi yang diambil yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetap terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada serta melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti Instansi terkait, Institusi Masyarakat, LSOM, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Stake Holder.
- b. Solusi yang diambil yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekalipun belum ada Pejabat definitif pada Bidang-bidang dan Sub Bidang, tetapi secara Etika Birokrasi berlaku senioritas Pangkat untuk mengendalikan sementara bidang tersebut (sebagai Pelaksana pada Bidang dan Sub Bidang) tersebut.

## **BAB IV**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **1. Tugas Pembantuan**

Pada dasarnya tugas pembantuan yang dilaksanakan DP3AKB Kabupaten Biak Numfor adalah bersifat kerjasama atau mendukung/membantu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Propinsi Papua dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Papua

#### **2. Kerja Sama Antar Daerah**

Pada dasarnya DP3AKB Kabupaten Biak Numfor tidak secara langsung melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, karena kewenangan tersebut berada pada tingkat Bupati Kabupaten Biak Numfor.

#### **3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

Keberhasilan Program pada DP3AKB Kabupaten Biak Numfor adalah dengan adanya peran serta masyarakat, Toga, Toma, Todat, dan Tokoh Perempuan. Untuk itu diperlukan kerja sama pihak-pihak demi terwujudnya program tersebut.

#### **4. Koordinasi dengan Instansi Vertikal**

Koordinasi dengan Instansi Vertikal pada pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan petunjuk dari Bupati kabupaten Biak Numfor.

Secara tehnik operasional DP3AKB Kabupaten Biak Numfor melakukan koordinasi dengan BKKBN Propinsi Papua dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Papua dan dalam hal Pencatatan / Pelaporan, Pengadaan Alat Kontrasepsi dan pembiayaan operasional dilapangan, koordinasi kegiatan-kegiatan dari Perwakilan BKKBN Propinsi Papua dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Propinsi Papua serta hal lain yang berhubungan dengan Pelayanan Keluarga Berencana., Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Bahwa untuk mewujudkan Misi DP3AKB yaitu “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera serta Kesetaraan dan Keadilan Gender”, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan pembiayaan dan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola program seperti Petugas lapangan dan kader-kader Institusi.

Masalah dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 seperti tidak terrealisasinya beberapa program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), akibat dari kebijakan dari Pemerintah Propinsi Papua, dan berdampak pada tidak terlaksananya rencana kerja (Renja) khususnya pembiayaan Program dan kegiatan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang mendapat perhatian serius agar program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dialokasikan anggaran khususnya dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Pengalaman tahun 2019 hendaknya merupakan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan datang guna menuju pada suatu hasil yang lebih memuaskan dalam rangka mewujudkan Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya.

## PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2019 Kabupaten Biak Numfor dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati Biak Numfor tahun 2019 dapat selesai dengan baik.

Dari hasil-hasil program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2019 kita dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan permasalahan yang ada.

Dengan adanya berbagai masalah dan tantangan serta peluang yang ada, maka di tahun 2020 kita dapat meningkatkan kualitas kinerja demi keberhasilan program-program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran tenaga demi kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.



